

Dampak Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa

Prosiding Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Melalui Strategi Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kabupaten Jember Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Accessions List, Southeast Asia Membangun desa partisipatif Berbagai aspek hukum analisis mengenai dampak lingkungan Serasi Laporan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Program community development perusahaan industri dan dampaknya pada masyarakat sekitar Pemantauan Partisipatif pada Pengelolaan Hutan Tropis Gaharu Globalisasi dan Neoliberalisme: Pengaruh dan Dampaknya bagi Demokratisasi Indonesia Kantor Menko Polkam, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman, Departemen Penerangan Upaya pengendalian dampak industrialisasi terhadap pengaturan pemukiman di Dati II Kodia Semarang Kompleksitas pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi daerah: studi kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Kewarganegaraan 1 SMP kelas 1 Sejarah pengaruh Pelita di daerah terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di Sulawesi Utara Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional Water Manajemen sumberdaya laut dalam perspektif otonomi daerah Realita dan visi ke depan perumahan dan permukiman di Indonesia Prosiding Workshop Nasional Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku-Papua Sustaining Upland Development in Southeast Asia Dampak kerusakan lingkungan pesisir terhadap tingkat sosial ekonomi masyarakat nelayan Serasi : warta kependudukan dan lingkungan hidup Pemetaan desa partisipatif dan penyelesaian konflik batas: studi kasus di desa-desa daerah aliran sungai Malinau, January s/d Juli 2000 Jalan Menuju Hutan Subur Rakyat Makmur Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan sumberdaya hutan di era desentralisasi Prosidings Seminar V Ekosistem Mangrove, Jember, 3-6 Agustus 1994 Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan Seminar Nasional Lingkungan Hidup 2000 "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Indonesia Baru" Himpunan istilah lingkungan untuk manajemen Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan Studi penerapan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) pada masyarakat pulau kecil sebagai solusi mengatasi problem kemandirian masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Commercialisation of Non-timber Forest Products: Review and Analysis of Research Bontang lestari, 2010 Pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan The Media as Development "textbook" Dampak pengelolaan keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat

Prosiding Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Melalui Strategi Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kabupaten Jember

Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Accessions List, Southeast Asia

Managing marine resources in relation with local marine policy in South Lampung and Buleleng, Bali Province in Indonesia.

Membangun desa partisipatif

Berbagai aspek hukum analisis mengenai dampak lingkungan

Serasi

Laporan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Program community development perusahaan industri dan dampaknya pada masyarakat sekitar

Environmental management in Indonesia; papers of a seminar.

Pemantauan Partisipatif pada Pengelolaan Hutan Tropis

Gaharu

Legal aspects of economic activities in the coastal zone area of Sebatik Island, Indonesia.

Globalisasi dan Neoliberalisme: Pengaruh dan Dampaknya bagi Demokratisasi Indonesia

Kantor Menko Polkam, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman, Departemen Penerangan

Upaya pengendalian dampak industrialisasi terhadap pengaturan pemukiman di Dati II Kodia Semarang

Socioeconomic development of marine resources in Indonesia.

Kompleksitas pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi daerah: studi kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

History of the influence of the five year development program on the social life of the villages of Sulawesi Utara region.

Kewarganegaraan 1 SMP kelas 1

Sejarah pengaruh Pelita di daerah terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di Sulawesi Utara

Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional

Indonesian dictionary of environmental terms.

Water

This study is one in a series of activities undertaken by CIFOR to reach a better understanding of the impact of commercialisation on forest resources and what factors influence the market demand for forest products. For example, two international workshops were organized by CIFOR in 1995 and another the following year to analyse key research issues in the field of NTFP development. These workshops recognised that the process of NTFP commercialisation interacts with people's welfare, forest management, tenure and control of resources, and forest structure and function (through ecological processes). Earlier review and analysis had generated a number of hypotheses, theories and conclusions related to the effects of commercialisation. Forest and resource tenure are likely to both affect the way a resource is managed and utilised, and be affected by changes in value due to commercialisation. Many authors have suggested that NTFP harvesting will be less damaging to biodiversity and other environmental values than management for timber. Others suggest that market pressures are likely to lead to the decline and eventual disappearance of valuable products and to severe impacts on the ecosystem. While there is a growing understanding (and acceptance) of the economic importance of forest products, especially for the poor, the potential impact of NTFP commercialisation needs to be better understood. A recommendation from the workshops was to undertake a thorough overview of the available literature to synthesise the key lessons about these areas of interaction. Such a review would critically examine the available information and analyses and identify key research areas needing further attention.

Manajemen sumberdaya laut dalam perspektif otonomi daerah

End-of-office report of former President Habibie's cabinet, May 1998-Oct. 1999.

Realita dan visi ke depan perumahan dan permukiman di Indonesia

Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan

dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelolaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Prosiding Workshop Nasional Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Implementasi program Perhutanan Sosial (PS) penuh dengan tantangan dan perdebatan tentang apakah dan bagaimana PS di Indonesia dapat memberikan kepastian hak tenurial bagi masyarakat dan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan. Khusus untuk wilayah Maluku dan Papua yang memiliki sejarah penguasaan lahan hutan yang cukup beragam dan karakteristik sosial budaya yang spesifik akan memberikan dampak yang berbeda dari implementasi PS. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan role model PS di Maluku dan Papua yang mendukung kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut didukung dengan kajian tentang: (1) Implementasi skema PS di Maluku dan Papua; (2) Pengelolaan kawasan, kelembagaan dan usaha PS; (3) Dampak implementasi PS terhadap masyarakat dan hutan; (4) Sistem tenurial lahan hutan dalam pengelolaan PS dan (5) Akses legal dan potensi konflik. Metode penelitian menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Penentuan Lokasi dilakukan secara purposive yang mewakili keempat provinsi dalam wilayah kerja BPSKL Maluku Papua dan mewakili implementasi skema PS. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara rumah tangga, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara secara mendalam dengan informan kunci. Analisis diskriptif kualitatif dilakukan dengan pendekatan triangulasi sumber dan teknik untuk mendapatkan analisis yang kredibel. Selanjutnya dilakukan sintesis terhadap hasil kajian untuk menentukan role model PS yang terdapat di wilayah Maluku Papua. Hasil Kajian menunjukkan bahwa Implementasi PS keempat lokasi studi mencakup skema HD, HKm, dan HTR sudah mendapatkan SK Gubernur/Walikota dan Menteri Kehutanan sejak pengelolaan dilakukan oleh BPDAS dan BP2HP. Selanjutnya BPSKL Wilayah Maluku Papua melakukan penataan lokasi dan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat serta pemberian bantuan alat ekonomi. Pengelolaan kawasan pada keempat lokasi studi mencakup kawasan HP, HPT dan HL dengan melakukan pengelolaan lahan agroforestry dengan penanaman berbagai jenis tanaman pertanian dan kehutanan. Pengembangan kapasitas kelembagaan PS yang telah dilakukan seperti kegiatan pelatihan, sekolah lapang dan studi banding ke lokasi-lokasi PS yang sudah maju. BPSKL Maluku Papua telah membentuk 45 unit KUPS dengan bantuan alat ekonomi produktif sebanyak 18 unit. Dampak social yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya implementasi PS masih terbatas pada perubahan pengetahuan tentang akses yang diberikan secara legal bagi masyarakat untuk mengusahakan lahan hutan. Lahan hutan yang dimaksudkan adalah lahan yang secara de facto telah diusahakan oleh masyarakat

secara turun temurun dan penguasaannya dibedakan berdasarkan hak adat yang berlaku. Kesesuaian dengan nilai dan norma yang berlaku dalam pengelolaan hutan khususnya nilai kebersamaan masih belum dintegrasikan sehingga muncul kecemburuan bagi anggota yang tidak dilibatkan dalam kelompok PS. Dampak ekonomi masih terbatas pada pengetahuan tentang bantuan alat ekonomi dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu penting untuk menambah pendapatan masyarakat. Produk yang diusahakan dari adanya pelatihan penggunaan produk ekonomi masih terbatas pada saat pendampingan kegiatan tersebut, selanjutnya masyarakat tidak dapat mengusahakan karena berbagai kendala teknis maupun modal dan pemasaran. Pendapatan yang diperoleh kelompok PS pada saat studi lebih pada beragam mata pencaharian yang diusahakan setiap keluarga. Dampak ekologi untuk kelestarian hutan dengan adanya implementasi PS, bagi masyarakat hal tersebut sudah diupayakan dengan berbagai kearifan local dan pengetahuan secara turun temurun untuk menjaga hutan. Hutan merupakan sumber penghidupan bahkan dianggap sebagai “air susu ibu” sehingga persoalan kelestarian hutan bagi masyarakat pada setiap lokasi studi menjadi hal yang sangat penting, bahkan dengan adanya implementasi PS bagi mereka sangat baik sekali karena mereka sendiri yang akan menjaga hutan tersebut. Implementasi PS juga bermanfaat membatasi pihak lain untuk mengambil hasil hutan tersebut selain dari masyarakat sendiri yang telah memiliki hak legal. Sistem tenurial masyarakat sangat penting diperhatikan dalam implementasi PS karena terdapat penguasaan secara adat yang dapat mendukung program PS. Pengaturan tenurial lahan secara adat memungkinkan masyarakat bertanggungjawab menjaga lahan hutan agar lestari dan manfaat hutan dapat dirasakan secara langsung dan sepenuhnya bagi yang mengelola. Berkaitan dengan hal tersebut maka akses legal yang diberikan harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku didalam kelompok masyarakat sehingga tidak ada konflik yang terjadi antar marga di dalam kelompok maupun konflik antar anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok PS dan yang tidak. Role model yang ditemukan pada keempat lokasi kajian lebih pada pembelajaran untuk tindakan antisipasi dan motivasi dalam keberlanjutan pengelolaan PS pasca ijin. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang diberikan kepada mereka. Masyarakat dengan kesadaran dan tanggungjawab sendiri akan terlibat dalam peluang ekonomi tersebut, walaupun sifatnya sementara, karena ada beragam mata pencaharian yang diusahakan oleh setiap keluarga. Modal social masyarakat di desa kajian mencakup kepercayaan dan kerjasama serta jaringan sangat berpotensi diperhatikan dalam implementasi program PS. Pengetahuan tentang kelestarian hutan telah berkembang dalam masyarakat, sehingga program PS untuk kelestarian hutan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam program tersebut. kebutuhan pendamping telah menghasilkan dinamika kelompok PS yang mendorong pelaksanaan program sampai pada tahap memperoleh manfaat usaha PS. Kajian dampak PS di Maluku dan Papua pada tahap awal merupakan dasar yang dapat dijadikan pembelajaran untuk implementasi program PS selanjutnya. Dukungan berbagai pihak khususnya pada masing-masing lokasi studi (kabupaten/kota) menjadi penting untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dengan menjaga kelestarian hutan. BPSKL Maluku Papua menjadi pihak utama untuk merealisasikan program PS memiliki tanggungjawab sampai pada produk yang dihasilkan dan luasan hutan tetap terjaga, dengan mengupayakan kemandirian masyarakat untuk

keberlanjutan program PS.

Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku-Papua

Mangrove ecology in Indonesia; proceedings.

Sustaining Upland Development in Southeast Asia

Dampak kerusakan lingkungan pesisir terhadap tingkat sosial ekonomi masyarakat nelayan

Serasi : warta kependudukan dan lingkungan hidup

Pemetaan desa partisipatif dan penyelesaian konflik batas: studi kasus di desa-desa daerah aliran sungai Malinau, January s/d Juli 2000

Community development program of industry company and its influences toward surrounding community; case study on PT Riau Andalan Pulp and Paper, Indonesia.

Jalan Menuju Hutan Subur Rakyat Makmur

Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Community participation in the forest management in Kabupaten Jayapura and Manokwari, Papua Province, Indonesia; collection of articles.

Pengelolaan sumberdaya hutan di era desentralisasi

Prosidings Seminar V Ekosistem Mangrove, Jember, 3-6 Agustus 1994

Collaborative partnership for natural resources management in Jember, Indonesia.

Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan

Seminar Nasional Lingkungan Hidup 2000 "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Indonesia Baru"

Buku ini hadir memberi cara pandang yang secara jelas ingin mengatakan pada khalayak bahwa pengelolaan hutan perlu perubahan mendasar. Dan, perubahan

tersebut dapat dilakukan dengan memercayai rakyat mengelola hutan —Budiman Sudjatmiko, M.Sc; M. Phil, Anggota DPR RI Membaca karya ini akan bisa memprovokasi pembaca untuk memikirkan dan mengusahakan bagaimana situasi “Hutan Kaya, Rakyat Melarat”, seperti yang ditulis oleh Peluso, bakal bisa menuju “Hutan Subur, Rakyat Makmur” —Noer Fauzi Rachman, Ph.D, Peneliti Politik Agraria dan Gerakan-gerakan Rakyat Pedesaan Buku ini menjadi salah satu referensi penting bagaimana disiplin Administrasi Publik membedah persoalan hubungan hutan-rakyat tersebut. —Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo; Pengajar pada Fakultas Kehutanan IPB dan Program Pascasarjana IPB dan UI, Anggota WG Tenure dan Presidium Dewan Kehutanan Nasional Ini adalah kesaksian Barid betapa hutan bagi masyarakat tani adalah hidup itu sendiri. Hutan tidak hanya soal sumber penghidupan, juga menjadi akar dan sumber budaya, relasi manusia dan alam yang bersinergi dan berdinamika dalam nalar sejarahnya sendiri —Ahmad Ya’kub, Aktivist di Sekretariat Bina Desa

Himpunan istilah lingkungan untuk manajemen

Environmental policies, law and legislation, Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan

Studi penerapan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) pada masyarakat pulau kecil sebagai solusi mengatasi problem kemandirian masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia

Commercialisation of Non-timber Forest Products: Review and Analysis of Research

Impact of environmental damage on the socio-economic position of fishermen; case studies.

Bontang lestari, 2010

Pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan

Development of building construction of housing in Indonesia.

The Media as Development "textbook"

Dampak pengelolaan keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat

Sustainable development of environment in Bontang, Kalimantan Timur Province, Indonesia.

[ROMANCE](#) [ACTION & ADVENTURE](#) [MYSTERY & THRILLER](#) [BIOGRAPHIES & HISTORY](#) [CHILDREN'S](#) [YOUNG ADULT](#) [FANTASY](#) [HISTORICAL FICTION](#) [HORROR](#) [LITERARY FICTION](#) [NON-FICTION](#) [SCIENCE FICTION](#)